



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL



**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020**



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **15** TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantul
4. Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2020 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - e. Rencana Kerja Badan Daerah;
 - f. Rencana Kerja Dinas Daerah;
 - g. Rencana Kerja Kantor Daerah; dan
 - h. Rencana Kerja Kecamatan.
- (2) Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
 - r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
- (4) Rencana Kerja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Rencana Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Kecamatan Srandakan;
 - b. Rencana Kerja Kecamatan Sanden;
 - c. Rencana Kerja Kecamatan Pajangan;
 - d. Rencana Kerja Kecamatan Sedayu;
 - e. Rencana Kerja Kecamatan Pandak;
 - f. Rencana Kerja Kecamatan Kasihan;
 - g. Rencana Kerja Kecamatan Bantul;
 - h. Rencana Kerja Kecamatan Bambanglipuro;

- i. Rencana Kerja Kecamatan Kretek;
- j. Rencana Kerja Kecamatan Pundong;
- k. Rencana Kerja Kecamatan Sewon;
- l. Rencana Kerja Kecamatan Jetis;
- m. Rencana Kerja Kecamatan Imogiri;
- n. Rencana Kerja Kecamatan Dlingo;
- o. Rencana Kerja Kecamatan Pleret;
- p. Rencana Kerja Kecamatan Banguntapan; dan
- q. Rencana Kerja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

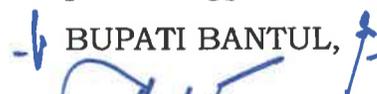
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 10 juli 2019

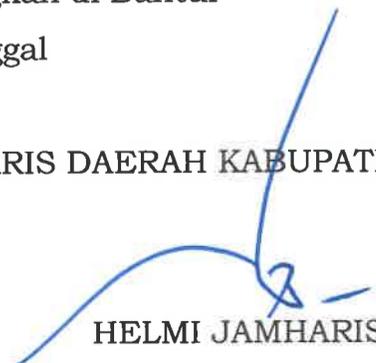
BUPATI BANTUL, 

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyusun Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

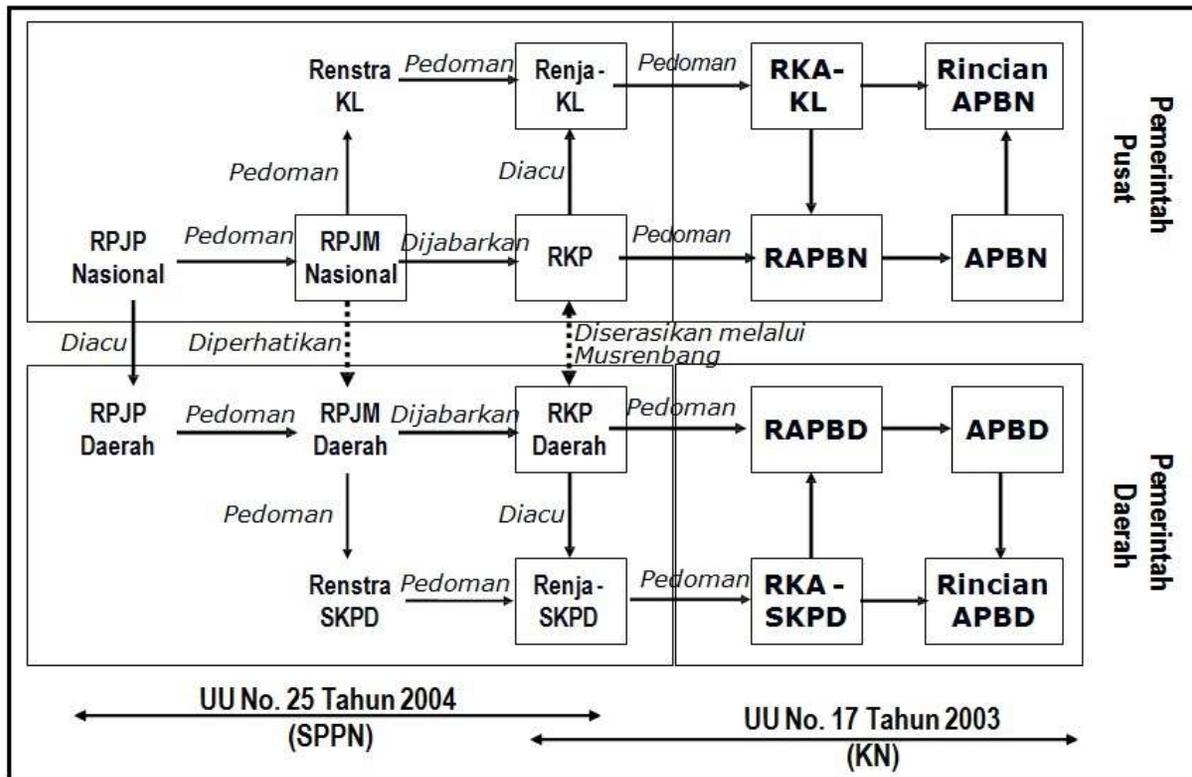
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam penyusunan RKA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Capaian Nilai AKIP belum dapat mencapai target yang ditentukan karena belum semua bukti evaluasi, monitoring dan tidaklanjutnya terdokumen dengan baik sehingga nilai tidak maksimal
a.	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Anggaran perjalanan dinas yang sedianya digunakan untuk pengiriman TOT tidak dipakai karena narasumber langsung datang ke Kabupaten Bantul dan pelaksanaan TOT dilaksanakan di Pemda Bantul
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena perubahan aturan dihapusnya pelaporan LP2P
a.	Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	Kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
b.	Kegiatan Pelaporan LP2P dan LHKPN*	Masih rendahnya kesadaran wajib lapor LHKPN
3.	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Ada jabatan yang belum terisi karena proses lelang jabatan belum dilaksanakan, dilaksanakan awal tahun 2019
a.	Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT*	Proses lelang jabatan yang kosong belum dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga ada jabatan yang belum terisi

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SDM dan dana yang memadai
a	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	SDM dan dana yang memadai
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SDM, dana dan prasarana yang memadai
a	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	SDM, dana dan prasarana yang memadai
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SDM, dana dan prasarana yang memadai
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	SDM, dana dan prasarana yang memadai
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	SDM, dana dan prasarana yang memadai
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	SDM, dana dan prasarana yang memadai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
	Kegiatan Ujian dinas dan penyesuaian ijazah	Keakuratan informasi sehingga seluruh peserta dapat mengikuti ujian dinas
	Kegiatan Uji Kompetensi dan Psikologi	Alat TES yang memadai dan ketepatan kehadiran peserta tes
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS	Data yang akurat dan kesiapan peserta diklat
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan PNS	SDM dan dana yang memadai, pengajuan ijin belajar dan tugs belajar sesuai perbup
	Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Dana • SDM dan sarpras yang memadai • Tersedianya aplikasi SAPA ASN • kerjasama tim BKPP
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Pengajuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga mempermudah proses selanjutnya
	Kegiatan Penilaian PNS	SDM dan dana mencukupi serta aplikasi, koordinasi dengan OPD
	Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan	Dana dan SDM yang memadai, berlakunya aturan baru tentang cuti
	Kegiatan Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	koordinasi yang baik dengan OPD dan kehadiran PNS dalam mediasi
6	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	SDM, dana memadai dan adanya aplikasi SAPK BKN
	Kegiatan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	SDM, dana memadai dan adanya aplikasi SAPK BKN
	Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	SDM dan dana yang memadai

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh ASN di lingkungan BKPP sehingga target kinerja dapat tercapai dan memperoleh nilai evaluasi kinerja yang melebihi target.
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pelaksanaan diklat terpenuhi jumlah pesertanya, dan ada diklat yang ada tambahan peserta.
	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Dilakukan penataan ASN secara bertahap

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan diklat teknis untuk peningkatan kompetensi lebih dioptimalkan.
2. Pelayanan terhadap ASN lebih ditingkatkan.
3. Pengembangan Sistem SAPA ASN.
4. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring capaian kinerja lebih dioptimalkan dengan menyertakan bukti administrasi yang lengkap.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019					
			Target Kinerja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)	(9)		(10)		(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	81	angka	80.72	angka	99.65	81	angka			
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah pembayaran asuransi	33	Orang / bulan	30	Orang / bulan	90.9	36	Orang / bulan	36	Orang / bulan	100
		Jumlah alat tulis kantor	52	Jenis	60	Jenis	115.4	54	Jenis	54	Jenis	100
		Jumlah pajak kendaraan dinas	16	Unit	15	Unit	93.7	19	Unit	19	Unit	100
		Jumlah pembayaran honor non PNS	33	Orang / bulan	33	Orang / bulan	100	36	Orang / bulan	36	Orang / bulan	100
		Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	15	Macam	22	Macam	146.7	14	Macam	14	Macam	100
		Jumlah barang cetak	9	Macam	10	Macam	111.1	10	Macam	10	Macam	100
		Jumlah buku peraturan perundang-undangan	15	Buah	16	Buah	106.7	0		0		0
		Jumlah benda pos	1.775	Lembar	1.580	Lembar	89	1.725	Lembar	1.725	Lembar	100
		Jumlah pembayaran honor Administrasi keuangan opd	120	Orang / bulan	120	Orang / bulan	100	120	Orang / bulan	120	Orang / bulan	100
		Jumlah penggandaan	100.230	Lembar	61.144	Lembar	61	176.575	Lembar	176.575	Lembar	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019					
			Target Kinerja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)	(9)		(10)		(11) = (10)/(9)
		Jumlah pembelian AC	0	-	0	-	0	1	Unit	1	Unit	100
		Jumlah Pembelian computer	0	-	0	-	0	5	Unit	5	Unit	100
		Jumlah Pembelian printer	0	-	0	-	0	3	Unit	3	Unit	100
		Jumlah pembelian UPS	0	-	0	-	0	5	Unit	5	Unit	100
		Jumlah Pembelian layer proyektor	0	-	0	-	0	1	Unit	1	Unit	100
		Jumlah pembelian buku	0	-	0	-	0	18	Unit	18	Unit	100
		Jumlah pengadaan aplikasi	0	-	0	-	0	1	Unit	1	Unit	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah servis kendaraan dinas roda 2	12	Unit	12	Unit	100	0	Unit	0	Unit	0
		Jumlah servis kendaraan dinas roda 4	5	Unit	5	Unit	100	0	Unit	0	Unit	0
		Jumlah servis kendaraan dinas/operasional	0	-	0		0	16	Unit	16	Unit	100
		Jumlah pembelian BBM dan pelumas kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	15.900	Liter	15.956	Liter	100	15.400	Liter	15.400	Liter	100
		Jumlah pemeliharaan dan suskucadang kendaraan dinas/opersional	0	-	0		0	16		16		100
		Jumlah pembelian sukucadang kendaraan dinas roda 4 dan 2	17	Unit	17	Unit	100	0		0		0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019					
			Target Kinerja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)	(9)		(10)		(11) = (10)/(9)
	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	38	orang	38	orang	100	22	orang	22	orang	100
	Uji Kompetensi dan Psikologi	Jumlah PNS yang mengikuti ujian kompetensi dan test psikologi	337	PNS	397	PNS	117.8	700	PNS	700	PNS	100
	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural, Teknis, Fungsional dan Prajabatan	0	-	0		0	705		705		100
		Jumlah jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural	76	PNS	76	PNS	100	0	PNS	0	PNS	0
		Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	1.231	PNS	985	PNS	80	0	PNS	0	PNS	0
		Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1	Dok	1	Dok	100	0	-	0	-	0
		Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	54		54	orang	100	0	orang	0	orang	0
	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar, dan mengajukan ijin belajar	107	orang	107	orang	100	110	orang	110	orang	100
	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Jumlah Dokumen Usulan Formasi	0	-	0		0	1		1		100
		Jumlah usulan formasi	2.000	Usulan formasi	2.643	Usulan formasi	132	0	Usulan formasi	0	Usulan formasi	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018					Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019				
			Target Kinerja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)	(9)		(10)		(11) = (10)/(9)
		Jumlah peserta seleksi non asn	2.400	orang	2.400	orang	100	0	orang	0	orang	0
		Jumlah peserta seleksi	2.650	orang	3.912	orang	147	5.000	orang	5.000	orang	100
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian										
		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	persen	100		100	100		100		100
	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Jumlah data dan pengelolaan dokumen kepegawaian	8000	Data	9491	Data	118.6	8.200	Data	8.200	Data	100
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lencana karya satya	400	PNS	338	PNS	84.5	400	PNS	400	PNS	100
	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Jumlah Pelaporan E-LHKPN	400	PNS	395	PNS	98.8	400	PNS	400	PNS	100
	Penilaian PNS	Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya	8.495	PNS	6.199	PNS	72.9	8.000	PNS	8.000	PNS	100
	Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan cuti	250	PNS	301	PNS	120	0	PNS	0	PNS	0
		Jumlah PNS yang mendapatkan layanan karis, karsu, karpeg dan taspen	150	PNS	141	PNS	94	0	PNS	0	PNS	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019					
			Target Kinerja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)	(9)		(10)		(11) = (10)/(9)
		Jumlah PNS yang mengajukan dan verifikasi pengembalian taperum	50	PNS	1	PNS	2	0	PNS	0	PNS	0
		Jumlah PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	0	-	0		0	350	PNS	350	PNS	100
		Jumlah Kegiatan HUT KORPRI	0	-	0		0	5	Macam keg	5	Macam keg	100
		Jumlah sosialisasi TPP	0	-	0		0	4	Sosialisasi	4	Sosialisasi	100
	Proses Penanganan Kasus kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin, di Uji kesehatan dan pengajuan ijin perceraian	43	PNS	37	PNS	86	40	PNS	40	PNS	100
	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Prosentase penempatan aparatur dalam jabatan										
	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1.600	PNS	2.033	PNS	127	1.600	PNS	1.600	PNS	100
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi	335	PNS	470	PNS	140	400	PNS	400	PNS	100
	Pengelolaan Mutasi Jabatan administrasi dan JPT	Jumlah PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	645	PNS	655	PNS	101	1.000	PNS	1.000	PNS	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang tidak memenuhi target adalah:

Presentase pemenuhan kompetensi ASN

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masih terdapat jabatan yang belum terisi karena memerlukan kompetensi dan syarat jabatan, khususnya untuk jabatan fungsional tertentu kesehatan.
 - b. Beberapa diklat peningkatan kompetensi yang ditawarkan kurang diminati.
2. IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang dapat melebihi target adalah:

Nilai IKP (Indeks Kepuasan Pegawai)

IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya sistem pelayanan satu pintu.
- b. Komitmen ASN di BKPP untuk dapat memberikan pelayanan yang baik untuk ASN di Kabupaten Bantul.
- c. Sosialisasi yang dilaksanakan cukup efektif sehingga proses pelayanan administrasi kepegawaian lebih meningkat.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi yaitu untuk pelaksanaan dan pengiriman diklat, bimtek dan sejenisnya menjadi prioritas utama.

2. Melaksanakan pengukuran kompetensi dan psikologi sebagai salah satu pertimbangan dalam penataan ASN.
3. Pengembangan sistem SAPA ASN.
4. Sosialisasi dan monitoring sebagai upaya untuk menekan jumlah pelanggaran disiplin pegawai.
5. Penataan ASN sesuai dengan kompetensi jabatannya.

Secara lebih rinci, capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Persentase pemenuhan kompetensi ASN	84%	89%	90%	89,03%	90,5%	91%	91,3%	Target belum terpenuhi karena masih ada kualifikasi jabatan yang belum terisi karena belum memenuhi kompetensi jabatan
2.	Nilai IKP (Indeks Kepuasan Pegawai)	73.55	81.32	81,5	82.44	81,70	81.80	82	Target terpenuhi didukung oleh komitmen ASN BKPP dengan penerapan Pelayanan Satu Pintu dan Keterbukan Informasi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Masih banyaknya jabatan fungsional tertentu yang belum terisi karena membutuhkan kualifikasi tertentu	Jumlah ASN dengan kualifikasi jabatan tertentu belum memadai
Kesadaran perangkat daerah untuk melaporkan tentang adanya kasus-kasus indisipliner dalam rangka pembinaan pegawai masih rendah	Keengganan atasan langsung bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahan adalah tanggungjawab dari atasan langsung
Pengisian SKP masih dianggap sebagai formalitas sehingga pada saat penilaian masih banyak ASN yang belum mengisi SKP	Masih banyak ASN yang belum memahami secara detail pengisian SKP

Selain itu, selama Tahun 2018, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Adanya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	Kinerja ASN yang dinilai belum optimal
Tersedianya sistem aplikasi SAPA ASN	
Banyaknya penawaran peningkatan kompetensi baik itu diklat, bimtek atau sejenisnya	
Fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Pembinaan kepegawaian secara proporsional dan berkesinambungan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	107	org	466.200.000	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	50	PNS	45.907.500	
	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Bantul	Jumlah dokumen usulan formasi jabatan	1	dokumen	1.500.000.000	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Bantul	Jumlah dokumen usulan formasi jabatan	1	Usulan	1.370.230.000	
			Jumlah peserta seleksi	3000	org					Jumlah peserta seleksi	3000		org
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bantul	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	%	552.446.950	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bantul	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	%	527.249.000	
		Bantul	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	83	%			Bantul	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	83	%		
	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Bantul	Jumlah data dan dokumen pegawai	8.900	pns	34.192.950	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Bantul	Jumlah data dan dokumen pegawai	8900	pns	19.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif								
	Pembinaan aparatur berprestasi	Bantul	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lencana	400	pns	382.164.000	Pembinaan aparatur berprestasi	Bantul	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lencana	300	pns	354.224.000							
			Jumlah Jenis prestasi ASN	2	jenis				Jumlah Jenis prestasi ASN	5	jenis								
	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Bantul	Jumlah PNS yang wajib lapor LHKPN	300	pns	34.090.000	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Bantul	Jumlah PNS yang wajib lapor LHKPN	300	pns	30.940.000							
	Penilaian PNS	Bantul	Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya	8.500	pns	35.000.000	Penilaian PNS	Bantul	Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya	8500	pns	34.510.000							
	Pengelolaan kesejahteraan aparatur	Bantul	Jumlah PNS penerima TPP	3.000	pns	20.000.000	Pengelolaan kesejahteraan aparatur	Bantul	Jumlah PNS penerima TPP	3000	pns	39.715.000							
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur	Bantul	Jumlah PNS yang mengajukan ijin perceraian	12 orang	org	47.000.000	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur	Bantul	Jumlah penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	40	pns	48.820.000							
			Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	10 orang															
			Jumlah PNS yang diuji kesehatan	15 orang															
3.	Program Pengelolaan Kepegawaian	Bantul	Persentase Penempatan aparatur	87	%	838.707.099	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Bantul	Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	87	%	766.644.000							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	Pindah/Purna Tugas PNS		dalam jabatan										
	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Bantul	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	1.600	org	85.000.000	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Bantul	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	1600	pns	71.380.000	
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Bantul	Jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi	335	org	90.000.000	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Bantul	Jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi	335	pns	62.280.000	
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	Bantul	Jumlah PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	1.000	org	663.707.099	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	Bantul	Jumlah PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	1000	pns	632.984.000	
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bantul	Nilai AKIP	81		1.445.989.056	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bantul	Nilai AKIP	81		1.412.862.500	
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bantul	Jumlah Pembayaran asuransi	36	ob	375.000.000	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bantul	Jumlah Pembayaran asuransi	48	ob	469.161.500	
			Jumlah alat tulis kantor	54	jenis				Jumlah alat tulis kantor	54	jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif
			Jumlah Pajak kendaraan dinas	19	unit			Jumlah Pajak kendaraan dinas	22	dokumen		
			Jumlah Pembayaran honor non PNS	36	ob			Jumlah Pembayaran honor non PNS	48	ob		
			Jumlah peralatan kebersihan	14	jenis			Jumlah peralatan kebersihan	15	jenis		
			Jumlah barang cetakan	10	mcm			Jumlah barang cetakan	10	jenis		
			Jumlah pembelian benda pos	1.725	lbr			Jumlah pembelian benda pos	1.725	buah		
			Jumlah pembayaran honor administrasi keuangan OPD	120	ob			Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	120	ob		
			Jumlah penggandaan	185.000	lbr			Jumlah penggandaan	143.000	lbr		
			Jumlah pembayaran jasa Telekomunikasi	12	bln			Jumlah pembayaran jasa Telekomunikasi	12	bln		
			Jumlah bahan bacaan/koran	12	bln			Jumlah bahan bacaan	12	bln		
			Jumlah pembayaran listrik	12	bln			Jumlah pembayaran listrik	12	bln		
	Penyediaan rapat rapat,	Bantul	Jumlah penyelenggara	1.500	org		Penyediaan rapat rapat,	Bantul	Jumlah penyelenggara	2.380	org	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
	koordinasi dan konsultasi		koordinasi rapat dan penerimaan tamu			1.070.989.056	koordinasi dan konsultasi		koordinasi rapat dan penerimaan tamu			943.701.000	
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	370	Org/prjln				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	322	Org/prjln		
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	440	Org/perjln				Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	473	Org/perjln		
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	%	875.745.573	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	%	791.495.000	
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	40	unit	500.000.000	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	37	unit	402.500.000	
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bantul	Jumlah servis kendaraan roda 2	12	unit	275.000.000	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bantul	Jumlah servis kendaraan roda	22	unit	313.395.000	
			Jumlah servis kendaraan roda 4	5	unit								
			Jumlah pembelian bbm dan pelumas kendaraan roda 2 dan 4	15.000	liter				Jumlah pembelian bbm dan pelumas	20.209	liter		
			Jumlah pembelian suku cadang kendaraan	17	unit				Jumlah pemeliharaan dan pembelian suku cadang	22	unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
			dinas roda 2 dan 4						kendaraan dinas				
			Jumlah pemeliharaan kendaraan	2	unit								
	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan	Bantul	Jumlah pemeliharaan dan perlengkapan kantor	17	unit	100.745.573	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan	Bantul	Jumlah pemeliharaan komputer	15	unit	75.600.000	
									Jumlah pemeliharaan AC	15	unit		Pada tahun 2019 jumlah Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan sudah dirinci per item.
									Jumlah pemeliharaan printer	25	unit		
									Jumlah pemeliharaan mebelair	10	unit		
									Jumlah pemeliharaan aplikasi	5	unit		
6.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	79		12.014.963	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	79		11.500.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan barang kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	Jumlah laporan	5	lap	12.014.963	Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan barang kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	Jumlah laporan	5	lap	11.500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepegawaian.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2020 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN
2. Penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
3. Penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka
4. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai
5. Pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
6. Peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi
7. Penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja
8. Penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN
9. Penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L dan Pemerintah Daerah
10. Penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN
11. Penguatan kebijakan dan implementasi/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN

12. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah.
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban.
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya ASN yang kompeten sesuai standar/jabatan	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	91
2	Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian	Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	81.80

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0405	KEPEGAWAIAN						6.596.000.000,00	0,00		
0405.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	81,00	1.412.862.500,00	0,00		
0405.040501.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	pembayaran asuransi	ob	48,00	469.161.500,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				alat tulis kantor	jenis	54,00				
				pembayaran pajak surat kendaraan	unit	22,00				
				peralatan kebersihan kantor	jenis	15,00				
				barang cetakan	jenis	10,00				
				bahan bacaan	jenis	2,00				
				penyediaan benda pos	lembar	1.725,00				
				pengelola keuangan dan barang	ob	120,00				
				penggandaan	lembar	143.000,00				
				pembayaran jasa telekomunikasi	bulan	12,00				
				Jasa administrasi kantor	ob	48,00				
				pembayaran listrik	bulan	12,00				
0405.040501.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	laporan	830,00	943.701.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerimaan tamu	orang	350,00				
				perjalanan dalam daerah	op	322,00				
				perjalanan dinas luar daerah	op	473,00				
0405.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95,00	791.495.000,00	0,00		
0405.040501.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	pengadaan lemari mekanis	unit	3,00	402.500.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				pembelian rak koran	unit	1,00				
				pembelian lemari arsip besi	unit	4,00				
				pembelian dispenser	unit	1,00				
				pembelian filling kabinet	unit	4,00				
				pembelian alat ukur kelembaban udara	unit	1,00				
				pembelian AC	unit	2,00				
				Pembelian komputer	unit	5,00				
				Pembelian laptop	unit	2,00				
				Pembelian printer	unit	5,00				
				Pembelian UPS	unit	10,00				
				pembelian layar LED	unit	1,00				
				pembelian buku	buku	5,00				
				pengadaan aplikasi	aplikasi	1,00				
0405.040501.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	5,00	313.395.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	17,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0405.040501.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	pemeliharaan komputer	unit	15,00	75.600.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				pemeliharaan AC	unit	15,00				
				pemeliharaan printer	unit	25,00				
				pemeliharaan mebelair	unit	10,00				
				pemeliharaan aplikasi	aplikasi	5,00				
0405.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	79,00	11.500.000,00	0,00		
0405.040501.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	dokumen perencanaan	dokumen	5,00	11.500.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				laporan keuangan dan aset	laporan	9,00				
				laporan evaluasi	laporan	4,00				
				laporan kepegawaian dan ketatausahaan	laporan	2,00				
0405.33	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		Capaian	Prosentase Aparatur yang memperoleh dokumen Kompetensi	Persen	10,00	3.086.249.500,00	0,00		
				Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	persen	0,00				
0405.040501.33.010	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah		Keluaran	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	PNS	85,00	17.200.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.33.013	Uji Kompetensi dan psikologi		Keluaran	Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan tes psikologi	PNS	150,00	171.600.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0405.040501.33.017	Pendidikan dan Pelatihan PNS		Keluaran	PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	orang	96,00	1.481.312.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	orang	90,00				
0405.040501.33.018	Penyelenggaraan Pendidikan PNS		Keluaran	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	PNS	50,00	45.907.500,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.33.019	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN		Keluaran	dokumen usulan formasi	dokumen	1,00	1.370.230.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				peserta seleksi	orang	3.000,00				
0405.34	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR		Capaian	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	Persen	100,00	527.249.000,00	0,00		
				Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur dalam jabatan	Persen	0,00				
				Persentase Penempatan ASN	Persen	0,00				
				Persentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun	persen	0,00				
				Persentase keakuratan data ASN	persen	0,00				
				Persentase verifikasi pengusulan penghargaan ASN	persen	0,00				
				Persentase ketepatan waktu verifikasi usulan tambahan penghasilan	persen	0,00				

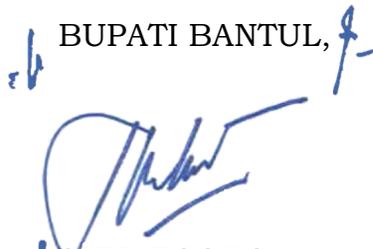
Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase permohonan ijin belajar dan tugas belajar sesuai kompetensi	persen	0,00				
				Persentase penilaian potensi dan kompetensi	persen	0,00				
				Prosentase penanganan disiplin pegawai	persen	0,00				
				Persentase ketepatan waktu verifikasi PAK	persen	0,00				
				Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	persen	83,00				
0405.040501.34.005	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai		Keluaran	Dokumen pegawai terupdate	dokumen	8.900,00	19.040.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.34.020	Pelaporan LP2P dan LHKPN		Keluaran	Dokumen LHKPN	PNS	300,00	30.940.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.34.033	Penilaian PNS		Keluaran	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	dokumen	8.500,00	34.510.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.34.040	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		Keluaran	Penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	kasus	40,00	48.820.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.34.041	Pembinaan Aparatur Berprestasi		Keluaran	Penghargaan PNS berprestasi	PNS	300,00	354.224.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Prestasi ASN	jenis	5,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0405.040501.34.042	Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur		Keluaran	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	dokumen	1.152,00	39.715.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	orang	600,00				
0405.36	PROGRAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PINDAH/PURNA TUGAS PNS		Capaian	Persentase Penempatan Aparatur dalam Jabatan	Persen	87,00	766.644.000,00	0,00		
0405.040501.36.001	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS		Keluaran	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	orang	1.600,00	71.380.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.36.002	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional		Keluaran	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	orang	335,00	62.280.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.36.003	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT		Keluaran	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	orang	1.000,00	632.984.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL, f-

SUHARSONO